

PEMERINTAH KOTA BATAM



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA BATAM**

2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2018 dapat tersusun. LKjIP ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan juga merupakan alat kendali atau alat pemacu kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Kinerja Sasaran sebagaimana telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016 - 2021.

Pemerintah Kota Batam sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, memiliki komitmen besar terhadap pembangunan berkelanjutan. Komitmen tersebut tertuang dalam Visi pembangunan daerah Kota Batam periode RPJMD 2016 – 2021 yaitu ***"Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat"***. Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan satu misi yang menjadi urusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu ***"Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel, dan mengayomi"***. selanjutnya misi tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategi (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2016 - 2021 yang digunakan sebagai landasan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2020.

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020 berfungsi sebagai pedoman kerja operasional yang harus dipertanggungjawabkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019. Semoga (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020 ini dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Ringkasan Eksekutif	4
Bab I Pendahuluan	6
Bab II Perencanaan Kinerja	12
Bab III Akuntabilitas Kinerja	19
Bab IV Penutup	25

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016 - 2021. LKjIP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2020 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Untuk mencapai visi dan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam menetapkan 6 (lima) sasaran strategis, dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan iktisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel

berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian, keuangan dan perencanaan;	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi PD Kota Batam	100	100	100
	Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD Kota Batam	100	100	100
Pengelolaan keuangan yang efektif, transparan dan akuntabel;	Opini Pemeriksaan BPK	WTP	WTP	100
Terwujudnya layanan penatausahaan keuangan yang tepat waktu;	Opini Pemeriksaan BPK	WTP	WTP	100

Terwujudnya penyampaian dan pelaporan keuangan dan penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tepat waktu dan sesuai SAP berbasis akrual;	Opini Pemeriksaan BPK	WTP	WTP	100
Terwujudnya validitas sistem pengelolaan aset daerah;	Opini Pemeriksaan BPK	WTP	WTP	100
Terwujudnya Pelaku Usaha Koprasi dan Usaha Mikro yang handal dan mandiri.	Opini Pemeriksaan BPK	WTP	WTP	100

Dari ilustrasi tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis yang telah ditetapkan berhasil dilaksanakan dengan baik.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat maka misi utama dari kedua undang-undang tersebut bukan hanya untuk melimpahkan kewenangan dan Pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah tetapi yang lebih penting adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan manajemen keuangan guna lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 dan diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, serta ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

Guna meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam sebagai wujud Pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan, serta dalam rangka mewujudkan *Good Government*, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam, sebagai langkah awal terlebih dahulu menyusun Rencana Strategis (Renstra), yang merupakan penjabaran dari tujuan yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan mengacu pada RPJMD Kota Batam 2016-2021.

Rencana Strategis tersebut menguraikan tentang Visi dan Misi serta faktor-faktor kunci keberhasilan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam, didalam upaya melaksanakan pencapaian secara optimal dan untuk menilai atau melihat keberhasilan/kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam

melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan pada unit kerja dapat dilihat melalui pengukuran kinerja dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

Pencapaian kinerja suatu unit Organisasi dapat diukur secara sistematis dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yaitu suatu sistem laporan untuk Pertanggungjawaban kepada Pejabat dan Publik atas kinerja yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Berkenaan dengan uraian tersebut diatas, maka dalam rangka pertanggungjawaban kepada masyarakat terhadap pelaksanaan tugas-tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam dipandang perlu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku.

1.2. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Kedudukan

Sesuai dengan peraturan Peraturan Walikota Batam Nomor 62 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Daerah Kota Batam, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam Pemerintah Kota Batam peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam, sangat vital sekali yaitu sebagai *stakeholders* dalam menggali Pendapatan Daerah dan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga dapat mendukung kelancaran roda pemerintahan daerah di Kota Batam.

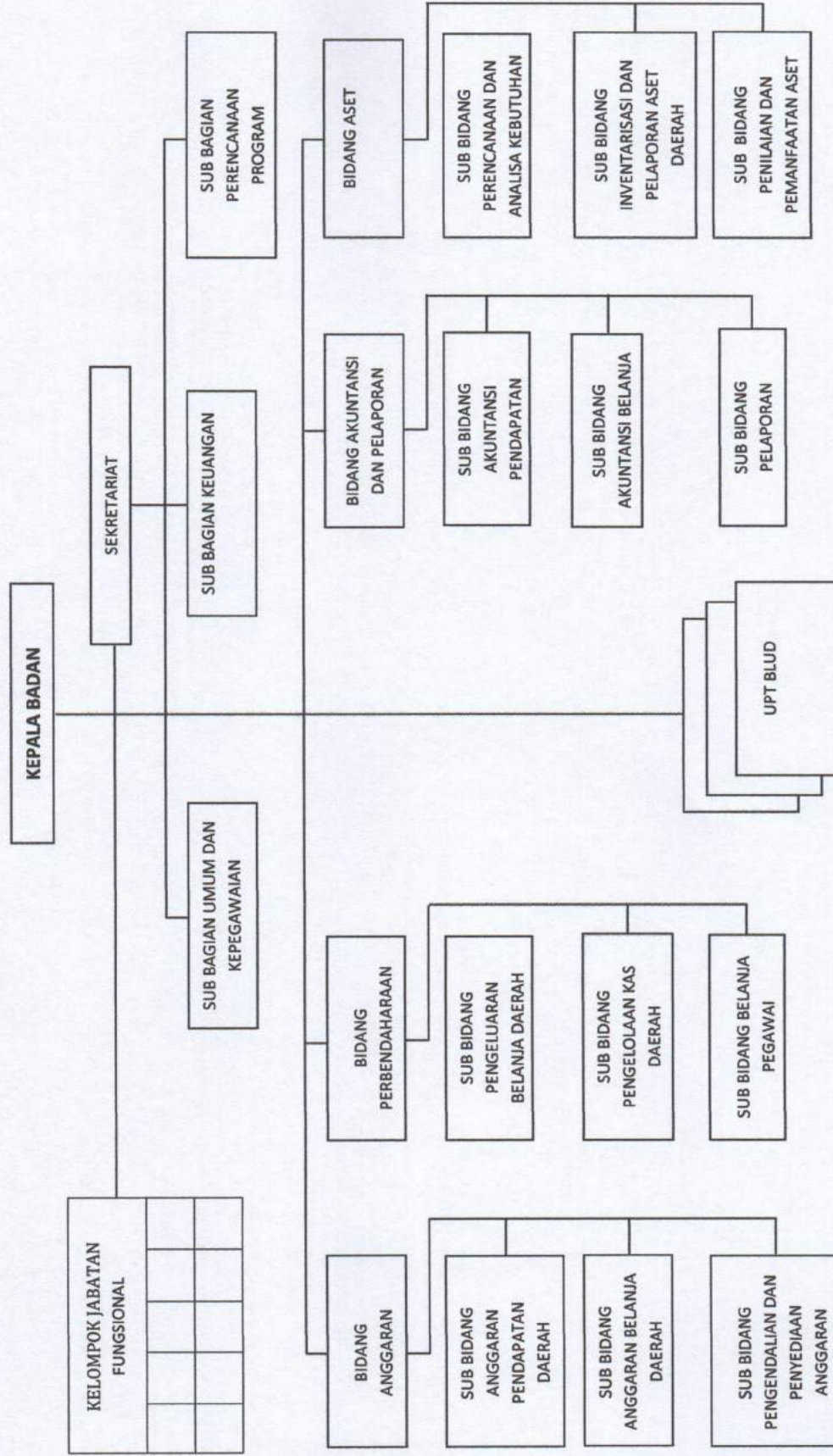
2. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Batam Nomor 62 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Daerah Kota Batam. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas pokok tersebut menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. pelaksanaan administrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BATAM



1.3. ASPEK STRATEGIS

Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kota Batam selama kurun waktu 2012-2016 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pendapatan daerah tersebut dihasilkan dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah Kota Batam. Di tahun 2012 realisasi pendapatan mencapai Rp 1.490.029.364.338,29, di tahun 2013 meningkat menjadi Rp 1.749.105.595.933,83, di tahun 2014 pendapatan meningkat menjadi Rp 2.021.540.370.494,82, di tahun 2015 menurun menjadi Rp 1.936.406.807.579,72 dan tahun 2016 meningkat menjadi Rp 2.215.680.286.681,50.

Realisasi pendapatan daerah Kota Batam dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 setiap tahunnya mengalami kenaikan, namun terjadi penurunan pada tahun 2015 diakibatkan penerimaan dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Bantuan Keuangan dari Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2015 belum terealisasi sehingga menjadi piutang bagi Pemerintah Kota Batam di tahun anggaran 2015, selain itu juga DBH Pajak dan DBH SDA dari Pemerintah Pusat untuk Triwulan II dan Triwulan IV belum terealisasi sampai akhir tahun anggaran 2015, pada tahun 2016 realisasi pendapatan kembali meningkat dibanding dengan realisasi dalam kurun waktu 2012-2015.

Jika dilakukan analisis berdasarkan proporsi sumber pendapatan, ternyata sumber pendapatan yang paling dominan berasal dari dana perimbangan, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berada diperingkat kedua. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan pembangunan di Kota Batam masih bergantung pada dana pusat melalui bantuan dana perimbangan.

Sedangkan proyeksi belanja daerah juga dapat menunjang kemampuan keuangan daerah jika dibandingkan dengan sisi penerimaan daerah.

Dengan kondisi perekonomian baik regional, nasional, maupun internasional yang semakin kondusif, menimbulkan harapan baru bahwa pembangunan kedepan diharapkan dapat berjalan dengan baik. Hal ini tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (*Performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik.

1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menginformasikan pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam selama tahun 2020. Capaian kinerja (performance results) tahun 2020 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Agar mempermudah memahami Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam diperlukan suatu penyajian yang berurutan dan tersistem, untuk itu Tim Penyusun membuat sistematika penyajian yang sudah sesuai standar pelaporan sebagai berikut :

1. Bab I : PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan latarbelakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi aspek strategis serta struktur organisasi
2. Bab II : PERENCANAAN KINERJA
berisi Perencanaan dan ringkasan/ikhtisar Penetapan Kinerja dimana dijelaskan muatan Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja Tahun 2020
3. Bab III : AKUNTABILITAS KINERJA
berisi tentang Capaian Kinerja yaitu Pengukuran Kinerja sebagai hasil perbandingan Penetapan Kinerja Tahun 2019 dengan Pencapaian kinerja Tahun 2020 dan Analisis Akuntabilitas Kinerja yang menjelaskan tentang keberhasilan kinerja selama tahun 2019
4. Bab IV : PENUTUP
berisi Penutup yang terdiri dari kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam dan Saran guna perbaikan kinerja dimasa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam 2016-2021 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kota Batam. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2016-2021 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kota Batam.

2.1.1. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Administrasi Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2016 – 2021 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi, maka dirumuskan tujuan **“Mewujudkan Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Tertib, Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel”**.

2.1.2. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sasaran yang harus dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam adalah:

1. Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
2. Pengelolaan keuangan yang efektif, transparan dan akuntabel;
3. Terwujudnya layanan penatusahaan keuangan yang tepat waktu;
4. Terwujudnya penyampaian dan pelaporan keuangan dan penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tepat waktu dan sesuai SAP berbasis akrual;
5. Terwujudnya validitas sistem pengelolaan aset daerah;
6. Terwujudnya Pelaku Usaha Koprasi dan Usaha Mikro yang handal dan mandiri.

**KETERKAITAN
(INTERELASI)**

**TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BATAM**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
Mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	1. Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian, keuangan dan perencanaan;	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi PD Kota Batam
		Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD Kota Batam
	2. Pengelolaan keuangan yang efektif, transparan dan akuntabel; 3. Terwujudnya layanan penatusahaan keuangan yang tepat waktu; 4. Terwujudnya penyampaian dan pelaporan keuangan dan penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tepat waktu dan sesuai SAP berbasis akrual; 5. Terwujudnya validitas sistem pengelolaan aset daerah; 6. Terwujudnya Pelaku Usaha Koprasi dan Usaha Mikro yang handal dan mandiri.	Opini Pemeriksaan BPK

2.1.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif mengenai cara Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra SKPD dengan efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komperhensif tersebut, maka dapat disusun strategi dan kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam sebagai berikut:

1. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
 - Strategi:
Menerapkan tertibnya administrasi yang efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan
 - Kebijakan: Meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Sasaran 2 : Pengelolaan keuangan yang efektif, transparan dan akuntabel;
 - Strategi:
Menerapkan sistem penyusunan, pengendalian dan penggunaan anggaran tepat waktu dan tepat sasaran
 - Kebijakan :
Meningkatkan pengelolaan perencanaan, pelaksanaan keuangan daerah yang mendukung kebutuhan pembangunan daerah

3. Sasaran 3 : Terwujudnya layanan penatusahaan keuangan yang tepat waktu;
 - Strategi:
Menerapkan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - Kebijakan :
Meningkatkan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

4. Sasaran 4 : Terwujudnya penyampaian dan pelaporan keuangan dan penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tepat waktu dan sesuai SAP berbasis akrual;
 - Strategi:
Menerapkan penyelenggaraan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - Kebijakan :
Meningkatkan pembinaan kepada OPD bersama instansi terkait dalam rangka mewujudkan Sistem Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual yang tepat waktu

5. Sasaran 5 : Terwujudnya validitas sistem pengelolaan aset daerah;
 - Strategi:
Meningkatkan validitas sistem pengelolaan aset daerah serta integrasi sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah
 - Kebijakan :

Meningkatkan penyelenggaraan sistem informasi pengelolaan aset daerah dan terintegrasinya sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah

6. Sasaran 6 : Terwujudnya Pelaku Usaha Koprasi dan Usaha Mikro yang handal dan mandiri.
- Strategi:
Menerapkan Pembinaan Perkuatan Permodalan Kepada Pelaku Usaha Koperasi dan Usaha Mikro
 - Kebijakan :
Pemberian Pinjaman Permodalan Kepada Pelaku Usaha Koperasi dan Usaha Mikro yang Produktif serta layak dikembangkan

2.1.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam pada Tahun Anggaran 2020, melaksanakan 3 (tiga) program yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

Kegiatan Tahun 2020

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program-program diatas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam melaksanakan 15 kegiatan, yaitu:

1. *Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;*
2. *Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur;*
3. *Penyusunan APBD Kota Batam;*
4. *Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;*
5. *Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Kota Batam;*
6. *Penyusunan KUA-PPAS Tahun Berikutnya dan Penyusunan KUA-PPAS Tahun Berjalan*
7. *Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;*
8. *Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah;*
9. *Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;*
10. *Penyusunan Perubahan APBD Kota Batam;*
11. *Penyusunan Standarisasi Harga Barang/Jasa;*
12. *Perencanaan Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*
13. *Koordinasi, Sinkronisasi dan Asistensi Status Aset Daerah Kota Batam;*
14. *Pengamanan Aset Daerah Kota Batam;*
15. *Pemanfaatan, Penilaian dan Pemindahtanganan Aset Pemerintah Kota Batam;*
16. *Operasional BLUD Dana Bergulir;*

2.2. PENETAPAN KINERJA

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Penetapan kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Penetapan Kinerja Tahun 2020 merupakan tahun kedua Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam, sehingga capaian kinerja tahun 2019 tersebut mencerminkan capaian awal renstra 2016-2021. Penetapan Kinerja Tahun 2019 sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
1	2	3
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian, keuangan dan perencanaan; Pengelolaan keuangan yang efektif, transparan dan akuntabel;	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi PD Kota Batam	100
	Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD Kota Batam	100
Terwujudnya layanan penatausahaan keuangan yang tepat waktu;	Opini Pemeriksaan BPK	WTP
Terwujudnya penyampaian dan pelaporan keuangan dan penyampaian	Opini Pemeriksaan BPK	WTP
Terwujudnya validitas sistem pengelolaan aset daerah;	Opini Pemeriksaan BPK	WTP
Terwujudnya Pelaku Usaha Koprasi dan Usaha Mikro yang handal dan mandiri.	Opini Pemeriksaan BPK	WTP

Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian, keuangan dan perencanaan;	Opini Pemeriksaan BPK	WTP
---	-----------------------	-----

Untuk mendukung penetapan kinerja tersebut di atas didukung anggaran sebesar **Rp.11.606.632.410,00** (*Sebelas milyar enam ratus Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu empat ratus sepuluh rupiah*).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan kegiatan dipergunakan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu :

85 s/d 100	Sangat Berhasil
70 s/d < 85	Berhasil
55 s/d < 70	Cukup Berhasil
0 s/d < 55	Tidak Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara Target dengan Realisasi pencapaian Kinerja/Fisik (Keluaran) Program dan Kegiatan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam pada tahun anggaran 2019 menjalankan 3 Program yaitu :

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Analisa pengukuran tingkat capaian Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel Analisa Capaian Kinerja Tahun 2020

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2019	KINERJA/FISIK (KELUARAN)			
			TAHUN 2020			
			TARGET	REALISASI	%	NILAI
1	2	3	4	5	6	7
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi PD Kota Batam	100%	100%	93%	93%	Sangat Berhasil
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Perengkapan administrasi perkantoran	100%	100%	93%	93%	Sangat Berhasil
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD Kota Batam	100%	100%	96%	96%	Sangat Berhasil
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	96%	96%	Sangat Berhasil
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini Pemeriksaan BPK	Opini WTP	Opini WTP	Opini WTP	100%	Sangat Berhasil
Penyusunan APBD Kota Batam	Dokumen (APBD)	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	Sangat Berhasil
Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen (Buku Sistem dan Prosedur)	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	Sangat Berhasil
Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Kota Batam	Sistem Aplikasi (SIPKD) berbasis akrual	1 Paket Peningkatan Sistem Aplikasi SIPKD Lanjutan	1 Paket Peningkatan Sistem Aplikasi SIPKD Lanjutan	1 Paket Peningkatan Sistem Aplikasi SIPKD Lanjutan	100%	Sangat Berhasil

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2019	KINERJA/FISIK (KELUARAN)			
			TAHUN 2020			
			TARGET	REALISASI	%	NILAI
1	2	3	4	5	6	7
Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Bimbingan Teknis Dan Sosialisasi	150 Orang	630 Orang	360 Orang	100%	Sangat Berhasil
Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	Dokumen (Laporan Keuangan Daerah Sesuai SAP Berbasis Akrua)	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	Sangat Berhasil
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen (Evaluasi APBD)	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	Sangat Berhasil
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Batam	Dokumen (Evaluasi Kinerja dan Pertanggungjawaban Walikota)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	Sangat Berhasil
Penyusunan Perubahan APBD Kota Batam	Dokumen (Perubahan APBD)	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	Sangat Berhasil
Penyusunan Standarisasi Harga Barang/Jasa	Dokumen (Standarisasi dan Harga Barang/Jasa)	2 Dokumen dan 1 paket sistem	2 Dokumen dan 1 paket sistem	2 Dokumen dan 1 paket sistem	100%	Sangat Berhasil
Koordinasi, Sinkronisasi dan Asistensi Status Aset Daerah Kota Batam	Dokumen (Status Aset)	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	Sangat Berhasil
Pengamanan Aset Daerah Kota Batam	Plang Nama Aset	60 Titik lokasi	65 Titik lokasi	60 Titik lokasi	100%	Sangat Berhasil
Pemanfaatan, Penilaian dan Pemindahtanganan Aset Pemerintah Kota Batam	Dokumen (Data pemanfaatan, penilaian dan pemindahtanganan aset)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Sangat Berhasil
Operasionalisasi BLUD Dana Bergulir	Operasionalisasi	100%	100%	100%	100%	Sangat Berhasil

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Analisa Capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan Program dan Kegiatan menghasilkan nilai yang berada pada range 85% sampai dengan 100% atau bermakna Sangat Berhasil.

B. REALISASI ANGGARAN

Penggunaan anggaran dan penyerapan anggaran Pagu Anggaran Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2020 sebesar Rp. 11.606.632.410,00 (Sebelas milyar enam ratus Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu empat ratus sepuluh rupiah). Realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 6.845.876.696,00 (Enam milyar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam Sembilan puluh enam rupiah) atau 58,98 % dengan rincian pada tabel sebagai berikut :

Tabel Realisasi Anggaran per Program Tahun Anggaran 2020

PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
	Rp	Rp	%
1	2	3	4
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,016,703,248.00	1,913,676,297.00	94.89
<i>Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	<i>2,016,703,248.00</i>	<i>1,913,676,297.00</i>	<i>94.89</i>
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	791.295.000.00	705.347.465.00	89.13
<i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	<i>791.295.000.00</i>	<i>705.347.465.00</i>	<i>89.13</i>
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8,798,634,162.00	4.226.852.934,50	79.33
<i>Penyusunan APBD Kota Batam</i>	<i>127,400,000.00</i>	<i>122,439,000.00</i>	<i>96.11</i>
<i>Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	<i>28,350,000.00</i>	<i>8,500,000.00</i>	<i>29.98</i>
<i>Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Kota Batam</i>	<i>323,250,000.00</i>	<i>142,566,300.50</i>	<i>44.10</i>
<i>Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</i>	<i>792,200,400.00</i>	<i>678,372,171.00</i>	<i>85.63</i>
<i>Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah</i>	<i>52,250,000.00</i>	<i>32,313,305.00</i>	<i>61.84</i>
<i>Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</i>	<i>37,050,000.00</i>	<i>36,940,000.00</i>	<i>99.70</i>
<i>Penyusunan KUA-PPAS Tahun Berikutnya dan Penyusunan Perubahan KUA-PPAS Tahun Berjalan</i>	<i>43,200,000.00</i>	<i>32,130,000.00</i>	<i>74.38</i>
<i>Penyusunan Perubahan APBD Kota Batam</i>	<i>127,400,000.00</i>	<i>125,680,000.00</i>	<i>98.65</i>
<i>Penyusunan Standarisasi Harga Barang/Jasa</i>	<i>118,550,000.00</i>	<i>116,600,000.00</i>	<i>98.36</i>
<i>Perencanaan Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>	<i>29,950,000.00</i>	<i>28,695,000.00</i>	<i>95.81</i>
<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Asistensi Status Aset Daerah Kota Batam</i>	<i>168,450,000.00</i>	<i>144,525,000.00</i>	<i>85.80</i>
<i>Pengamanan Aset Daerah Kota Batam</i>	<i>60,000,000.00</i>	<i>59,002,000.00</i>	<i>98.34</i>
<i>Pemanfaatan, Penilaian dan Pematangan Aset Pemerintah Kota Batam</i>	<i>1,665,950,000.00</i>	<i>1,625,710,000.00</i>	<i>97.58</i>
<i>Penyusunan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	<i>128.833.250.00</i>	<i>00.00</i>	<i>00.00</i>
<i>Operasionalisasi BLUD Dana Bergulir</i>	<i>5,095,800,512.00</i>	<i>1,073,380,158.00</i>	<i>21.06</i>

Dari table realisasi Anggaran di atas terdapat beberapa kegiatan yang Capaian realisasi Keuangannya dibawah 50 %, hal tersebut dapat kami jelaskan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Capaian Realisasi fisik dari kegiatan ini telah mencapai 100% dan realisasi keuangan mencapai 29.98 %.

Hal ini terjadi karena tidak dilaksanakannya Sosialisasi Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebanyak 2 kali (100 orang peserta) dikarenakan adanya Pandemi Covid-19, hal ini ditegaskan melalui surat Keputusan Presiden nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Disease 2019 (COVID-19) dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia HK.01.07/Menkes/328/2020 Tentang panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) ditempat kerja Perkantoran dan Industri dalam mendukung Keberlangsungan usaha pada situasi pandemi; serta surat edaran Walikota Batam nomor 181 tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease-19 (COVID-19) yang berisi: Kegiatan pertemuan dan rapat yang melibatkan banyak orang agar dihindari dan dialihkan dengan menggunakan teknologi informasi (IT) seperti : zoom meeting, google meet, Microsoft team dan lain sebagainya

2. Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Kota Batam.

capaian realisasi keuangan dari pelaksanaan kegiatan ini sebesar 44,10% sedangkan realisasi fisik 100%. Hal ini disebabkan tidak terserap belanja Perjalanan Dinas untuk Tenaga Ahli, dikarenakan adanya Pandemi Covid-19, yang ditegaskan melalui surat Keputusan Presiden nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Disease 2019 (COVID-19) dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia HK.01.07/Menkes/328/2020 Tentang panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) ditempat kerja Perkantoran dan Industri dalam mendukung Keberlangsungan usaha pada situasi pandemi.

Kegiatan Pendampingan Tenaga Ahli yang seharusnya dilakukan melalui tatap muka dan pendampingan langsung dilokasi Kota Batam dialihkan dengan menggunakan teknologi informasi (IT) seperti: zoom meeting, google meet, Microsoft team dan lain sebagainya.

3. Kegiatan Penyusunan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah

Capaian Realisasi fisik dari kegiatan ini telah mencapai 00.00% dan realisasi keuangan mencapai 00.00%. Kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan dikarenakan turunan PP 12/2019 berupa peraturan Menteri dalam negeri tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah (pengganti permendagri 13 tahun 2006) belum terbit.

4. Kegiatan Operasionalisasi BLUD Dana Bergulir

Jumlah pagu Belanja Operasional BLUD Dana Bergulir pada APBD 2020 sesuai target pendapatan yaitu sebesar Rp. 1.200.000.000.00, tetapi pada PAPBD 2020 bertambah menjadi Rp. 5.095.80.512.00,- penambahan ini diperoleh dari Silpa tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 3.895.800.512.00., penambahan ini berdampak pada anjloknya angka realisasi keuangan yang menjadi 21,06% sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%. Menurut rencana Silpa tersebut akan disetorkan ke Kas Daerah untuk meminimalisir kas yang belum terpakai hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Walikota Batam Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penyetoran Silpa BLUD Ke Kas Daerah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Demikian Laporan Kinerja Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2020 ini disusun, merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dan sebagai tindak lanjut dari Permenpan 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. Saran

Agar suatu kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan sebaiknya dilakukan evaluasi berkala oleh Pimpinan dan diharapkan masing-masing Bidang lebih fokus melaksanakan Program dan Keegiatannya agar sasaran sebagaimana tersebut dalam Rencana Kerja (Renja) dapat tercapai.

Batam, Februari 2021

**Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Dan Aset Daerah Kota Batam,**



ABD. MALIK, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19660727 199603 1 003